

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI KAIMANA**



PENGADILAN NEGERI KAIMANA

Jalan PTT Kaimana

Telp. (0957) 2227182 email : pnkaimana@gmail.com

Home : www.pn-kaimana.go.id

KAIMANA



KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, atas Berkat dan rahmat-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021 Pengadilan Negeri Kaimana dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi hasil kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2021, baik kegiatan di bidang administrasi perkara maupun administrasi umum. Laporan ini juga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Kaimana yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Kaimana dalam melaksanakan berbagai kewajibannya sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Jo. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : W30-U/2316/OT.01.2/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2021.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Kaimana ini disusun, dan kami sadar masih terdapat kekurangan dalam laporan ini. Semoga Laporan ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima pada masa yang akan datang.

Kaimana, 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Kaimana,



DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.
NIP. 19810725 200312 2 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I. Pendahuluan | 1 |
| BAB II. Keadaan Perkara di Peradilan Umum | 7 |
| A. Keadaan Perkara | 7 |
| B. Penyelesaian Perkara | 7 |
| C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Setifikasi ISO Pengadilan) | 13 |
| BAB III. Sumber Daya Manusia | 15 |
| 1. Mutasi | 18 |
| 2. Promosi | 18 |
| 3. Pensiun | 18 |
| 4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Mengikuti Diklat) | 19 |
| BAB IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi | 21 |
| A. Pengelolaan Keuangan | 21 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 24 |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi | 40 |
| BAB V. Peningkatan Pelayanan Publik | 44 |
| A. Akreditasi Penjaminan Mutu | 44 |
| B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | 45 |
| C. Inovasi Pelayanan Publik | 49 |
| BAB VI. Pengawasan | 53 |
| A. Internal | 53 |
| B. Evaluasi | 54 |
| BAB VII. Penutup | |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Rekomendasi | 55 |



BAB I PENDAHULUAN

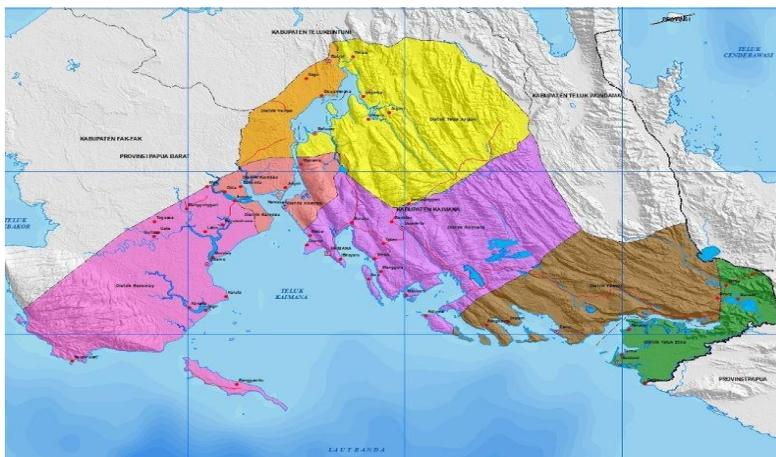
A. Sejarah Pengadilan Negeri Kaimana

Pengadilan Negeri Kaimana merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jayapura yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Kaimana diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H, di Molonguane Kabupaten Talaud. Saat ini Pengadilan Negeri Kaimana berkantor di Gedung kantor yang merupakan eks *Zitting Plaats* (Tempat Sidang Di Kaimana) Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengadilan Negeri Kaimana memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 7 (tujuh) distrik, yaitu :

1. Distrik Kaimana, Ibu Kota Kabupaten Kaimana yang terdiri dari 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy dan 17 (tujuh belas) kampung;
2. Distrik Teluk Arguni, Ibukota di Bofuwerdan terdiri dari 24 Kampung;
3. Distrik Teluk Etna, Ibukota di Kirurudan, terdiri dari 5 kampung;
4. Distrik Buruway, Ibukota di Kambaladan, terdiri dari 10 Kampung;
5. Distrik Arguni Bawah, Ibukota di Tanusandan, terdiri dari 15 Kampung;
6. Distrik Kambrau, Ibukota di Waho, terdiri dari 7 kampung;
7. Distrik Yamor, Ibukota di Urubikadan, terdiri dari 6 kampung.



B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Kaimana merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan peradilan umum, sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas-tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, diperlukan rencana strategis berupa visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Negeri Kaimana.

Visi Pengadilan Negeri Kaimana mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Kaimana yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kaimana;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadialn Negeri Kaimana;
4. Menjaga dan Meningkatkan kredibilitas serta Transparansi di Pengadilan Negeri Kaimana.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Kaimana merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis yang menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode tahun 2020-2024.

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakandalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Kaimana telah menyusun dokumen reviu Renstra yang pertama yang merupakan tindak lanjut

atas terbitnya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan revidi indikator kinerja utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- ✓ Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, tujuan ini dicapai melalui sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
 - Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus (one day publish), tujuan ini dicapai melalui sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- c. Terwujudnya pelayanan prima untuk mendukung proses peradilan dan pelayanan publik
 - Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah presentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu, tujuan ini dicapai melalui sasaran Peningkatan tranparansi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran dan aset.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Presentase penurunan sisa perkara
 - d. Index kepuasan pencari keadilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Presentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
 - b. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus
3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran dan aset.
 - a. Presentase pengelolaan aparatur (SDM) peradilan yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Presentase pengelolaan keuangan peradilan yang tepat
 - c. Presentase pemenuhan kebutuhan anggaran peradilan yang optimal



BAB II KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021

Keadaan perkara tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Kaimana, baik perkara pidana maupun perkara perdata adalah sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2020 | Perkara Masuk Tahun 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| PIDANA | | |
| Pidana Biasa | 2 | 27 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 1 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 |
| Praperadilan | 0 | 1 |
| Pidana Anak | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 29 |
| PERDATA | | |
| Gugatan | 1 | 19 |
| Permohonan | 0 | 52 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 71 |
| TOTAL | 3 | 100 |

B. Penyelesaian Perkara

Beban perkara di Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun 2021 untuk perkara pidana adalah 29 perkara, perdata masuk ditambah sisa perkara tahun 2020 sejumlah 2 perkara sehingga total perkara adalah 31 perkara pidana dan untuk yang diselesaikan (putus) tepat waktu sejumlah 31 perkara. Sedangkan beban perkara perdata pada tahun 2021 adalah 71 perkara masuk ditambah sisa perkara tahun 2020 sejumlah 1 Perkara sehingga total adalah 72 Perkara dan untuk perkara yang diselesaikan (putus) tepat waktu sejumlah 68 perkara.

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2020 | Perkara Masuk Tahun 2021 | Perkara yang diputus Tahun 2021 | Sisa Perkara Tahun 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| PIDANA | | | | |
| Pidana Biasa | 2 | 27 | 29 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praperadilan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 29 | 31 | 0 |
| PERDATA | | | | |
| Gugatan | 1 | 19 | 16 | 4 |
| Permohonan | 0 | 52 | 52 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 71 | 68 | 4 |
| TOTAL | 3 | 100 | 99 | 4 |

Analisis capaian target masing-masing perkara adalah sebagai berikut :

| Perkara Pidana |
|--|
| Beban : 31 perkara Putus : 31 Perkara Capaian : = $(31/31) \times 100\%$ = $1 \times 100\%$ = 100% |

| Perkara Perdata |
|---|
| Beban : 72 perkara Putus : 68 Perkara Capaian : = $(68/72) \times 100\%$ = $0,9444 \times 100\%$ = 94,44% |

Capaian masing-masing jenis perkara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

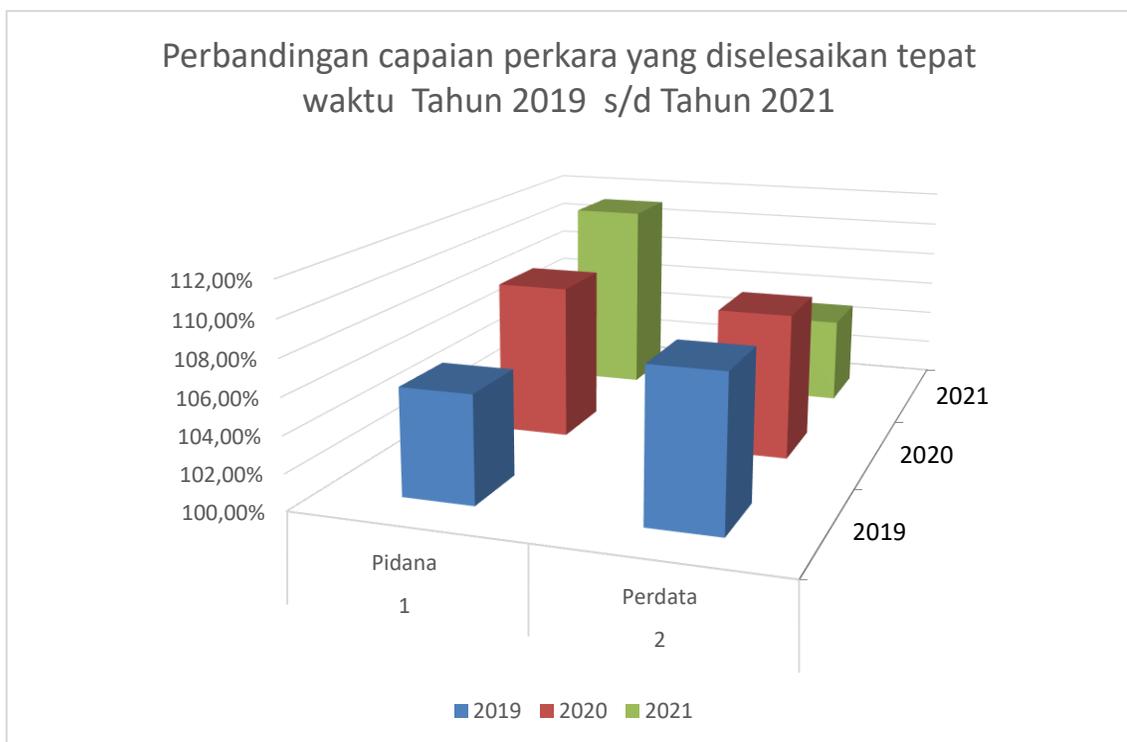
| INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| Pidana | 90% | 100% | 111.11% |
| Perdata | 90% | 94.44% | 104.93% |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2021 | | | 108.02% |

Perbandingan capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Negeri

Kaimana pada Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| | Pidana | 105.94% | 108.72% | 111.11% |
| | Perdata | 108.33% | 108.18% | 104.93% |
| Rata-Rata Capaian | | 107.14% | 108.45% | 108.02% |

Perbandingan tersebut dapat juga dilihat pada grafik dibawah ini:



Tabel dan grafik perbandingan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 capaian indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020 yakni pada penyelesaian perkara pidana. Secara umum capaian ini sudah cukup baik dikarenakan rata-rata capaiannya di atas 100%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya kebijakan mengenai batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

2. Implementasi Sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) secara tepat waktu, yaitu *one day publish* (satu hari setelah putus).
3. Adanya aplikasi Monitoring dan Implementasi SIPP (MIS) untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu yang ditentukan.
4. Evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.

❖ **Indikator Persentase Penurunan sisa Perkara Perdata dan Pidana**

Pengukuran capaian ini adalah perbandingan antara selisih jumlah sisa perkara setahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan
 T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

sebelumnya.

Jumlah sisa perkara Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2019 dan 2020 diuraikan pada tabel berikut ini:

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2020 | Sisa Perkara Tahun 2021 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| PIDANA | | |
| Pidana Biasa | 2 | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 |
| Lalu Lintas | 0 | 0 |
| Praperadilan | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 0 |
| PERDATA | | |
| Gugatan | 1 | 4 |
| Permohonan | 0 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 4 |
| TOTAL | 3 | 4 |

Berdasarkan tabel di atas, analisis capaian persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Kaimana pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Perkara Pidana | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Sisa Tahun 2020 | 2 | perkara |
| Sisa Tahun 2021 | 0 | Perkara |
| Capaian | = | $\frac{(2 - 0)}{2} \times 100\%$ |
| | = | $\frac{(2)}{2} \times 100\%$ |
| | = | 100% |

| Perkara Perdata | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Sisa Tahun 2020 | 1 | perkara |
| Sisa Tahun 2021 | 4 | Perkara |
| Capaian | = | $\frac{(1 - 4)}{1} \times 100\%$ |
| | = | $\frac{(-3)}{1} \times 100\%$ |
| | = | -300% |

Dari analisis capaian di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 capaian persentase penurunan sisa perkara baik pidana maupun perdata melebihi target yang ditentukan. Capaian masing-masing jenis perkara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase penurunan sisa perkara Tahun 2021 | | | |
| Pidana | 50% | 100.00% | 200.00% |
| Perdata | 50% | -300.00% | -60.00% |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2021 | | | 170.00% |

Perbandingan capaian indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN | | |
|-------------------|--|----------|------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Persentase penurunan sisa perkara Pidana | -66.67% | 0% | 200.00% |
| | Perdata | -66.67% | 0% | -60.00% |
| Rata-Rata Capaian | | -100.01% | 0% | 170.00% |

Perbandingan tersebut dapat juga dilihat pada grafik dibawah ini :



Sisa perkara pidana pada tahun 2020 sejumlah 2 perkara dan sisa perkara pidana pada tahun 2021 nihil. Hal ini berarti produktifitas penyelesaian perkara di tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Dimana sisa perkara pidana di tahun 2019 sejumlah 2 perkara dan sisa perkara pidana di tahun 2020 sejumlah 2 perkara. Hal ini menunjukkan capaian penyelesaian perkara tepat waktu di tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan dan cenderung tetap sama. Demikian juga dengan sisa perkara perdata pada tahun 2020 sejumlah 1 perkara dan sisa perkara perdata pada tahun 2021 sejumlah 4 perkara. Hal ini menunjukkan

penyelesaian perkara perdata ditahun 2021 mengalami penurunan, karena dipengaruhi oleh jenis dan sifat perkara yang didaftarkan pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini pun sama pada tahun 2019 dan tahun 2020 dimana sisa perkara perdata di tahun 2019 sejumlah 1 perkara dan pada tahun 2020 sejumlah 1 perkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Kaimana telah mengikuti Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diaudit. Dan berdasarkan Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II diberikan Akreditasi dengan kualifikasi "A" (Excellent)



❖ Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dan realisasi anggaran Posbakum Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 24.000.000, (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atau penyerapan anggaran Posbakum adalah sebesar 100%.

❖ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Alokasi anggaran untuk sidang keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun anggaran 2021 tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan sidang keliling.

❖ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Alokasi anggaran untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) pada Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun anggaran 2021 tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan Perkara Prodeo.



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka meningkatkan kinerja, guna mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Negeri Kaimana memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban di satuan kerja. Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Kaimana memiliki 20 (dua puluh) orang Aparatur yang terdiri dari Ketua, para Hakim, Para pejabat struktural dan fungsional, staf pelaksana, dan juga PPNPN/tenaga honorer yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Pramubakti/Tenaga Kebersihan, Satpam, dan Sopir/Pengemudi.

- Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan kepangkatan/golongan/ dan Pendidikan

Berikut komposisi Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Kaimana berdasarkan kepangkatan/golongan dan Pendidikan, dijabarkan dalam table sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kaimana : 20 Orang

| No. | Golongan Ruang | Jumlah |
|-----|---------------------------|---------|
| 1 | Pembina Tk. I (IV/b) | - |
| 2 | Pembina (IV/a) | 1 Orang |
| 3 | Penata Tk. I (III/d) | 4 Orang |
| 4 | Penata (III/c) | 3 Orang |
| 5 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 2 Orang |
| 6 | Penata Muda (III/a) | 8 Orang |
| 7 | Pengatur (II/c) | 2 Orang |

- Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|----------|
| 1 | Strata 2 (S2) | 4 Orang |
| 2 | Strata 1 (S1) | 13 Orang |
| 3 | Diploma III (D3) | 2 Orang |
| 4 | SLTA | 1 Orang |

➤ Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-----|--|-----------|
| 1 | Ketua | 1 Orang |
| 2 | Wakil Ketua | Belum ada |
| 3 | Hakim | 5 Orang |
| 4 | Panitera | 1 Orang |
| 5 | Sekretaris | 1 Orang |
| 6 | Panitera Muda Pidana | 1 Orang |
| 7 | Panitera Muda Perdata | 1 Orang |
| 8 | Panitera Muda Hukum | 1 Orang |
| 9 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | 1 Orang |
| 10 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 Orang |
| 11 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Belum ada |
| 12 | Panitera Pengganti | Belum ada |
| 13 | Jurusita/Jurusita Pengganti | 1 Orang |
| 14 | Staf Pelaksana | 3 Orang |
| 15 | CPNS | 3 Orang |

➤ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Kontrak

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|---------------------------|------------|
| 1 | Yenih Tulada, ST | Pramubakti |
| 2 | Maria Gema Ohoiledwarin | Pramubakti |
| 3 | Stevany Casandra Litaay | Pramubakti |
| 4 | Meysyn C. Leatemia, A.Md. | Pramubakti |
| 5 | Alparis Iha, A.Md.Tek | Satpam |
| 6 | Thomas Batmomolin | Satpam |
| 7 | Suherman | Sopir |
| 8 | Araens Batlajeri | Sopir |

DATA BEZETTING PADA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

| NO | NAMA NIP | GOLONGAN PANGKAT | | | JABATAN | | | PENDIDIKAN TERAKHIR |
|-----|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|
| | | GOLONGAN | TMT | NOMOR SK GOLONGAN | JABATAN | TMT | NOMOR SK JABATAN | |
| 1. | DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H. 19810725 200312 2 001 | Pembina IV/a | 01-04-2020 | 256/DJU/SK/KP.04.1/3/2020 | Ketua Pengadilan | 18-10-2021 | 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021 | S2 |
| 2. | ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H.,M.H. 19750601 200212 1 003 | Penata Tingkat I III/d | 01-04-2015 | 160/DJU/SK/KP.04.1/3/2015 | Hakim Tingkat Pertama | 14-09-2021 | 1759/DJU/SK/KP.04.5/19/2021 | S2 |
| 3. | YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. 19931020 201712 2 002 | Penata Muda Tingkat I III/b | 01-10-2021 | 1763/DJU/SK/KP.04.1/SK/9/2021 | Hakim Tingkat Pertama | 13-07-2020 | 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020 | S2 |
| 4. | MUHAMMAD TALFIQ AKBAR M, S.H. 19950923 201712 1 005 | Penata Muda III/a | 01-12-2017 | 1034/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017 | Hakim Tingkat Pertama | 20-01-2021 | 1591/DJU/SK/KP.04.5/10/2020 | S1 |
| 5. | ANDI RAMUDU UTOMO, S.H. 19950809 201712 1 005 | Penata Muda III/a | 01-12-2017 | 1014/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017 | Hakim Tingkat Pertama | 20-01-2021 | 1591/DJU/SK/KP.04.5/10/2020 | S1 |
| 6. | INDRA ARDIANSYAH, S.H. 19840307 201712 1 003 | Penata Muda III/a | 01-12-2017 | 1022/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017 | Hakim Tingkat Pertama | 13-07-2021 | 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020 | S1 |
| 7. | BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H. 19681206 199003 1 002 | Penata Tingkat I III/d | 01-04-2019 | 2430/DJU/SK/KP.04.1/5/2019 | Panitera Tingkat Pertama | 21-07-2020 | 616/DJU/SK/KP.04.5/4/2020 | S1 |
| 8. | HUBERTHINA TAFRE, S.H. 19661209 199712 2 001 | Penata Tingkat I III/d | 01-04-2010 | W30-U/194/KP.04.1/V/2010 | Sekretaris | 05-11-2018 | 564/SEK/Kp./SK/XI/2018 | S1 |
| 9. | NOVITA SAMPE, S.T. 19861108 200912 2 005 | Penata Tingkat I III/d | 01-10-2021 | W30-U/19/KP.01.1/8/2021 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | 27-05-2019 | 185/SEK/Kp./SK/III/2019 | S1 |
| 10. | WELDA FIFIN, S.H. 19820113 200604 2 004 | Penata III/c | 01-04-2019 | 1217/DJU/SK/KP.04.1/4/2019 | Panitera Muda Hukum | 05-11-2018 | 1927/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 | S1 |
| 11. | JAKLELY LODEWIK SERPARA, S.T. 19900628 201101 1 010 | Penata III/c | 01-04-2021 | W30-U/05/KP.04.1/3/2021 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | 05-11-2018 | 564/SEK/Kp./SK/XI/2018 | S1 |
| 12. | LIM KATANDEK, S.H. 19820924 201101 2 017 | Penata III/c | 01-04-2019 | 1182/DJU/SK/KP.04.1/4/2019 | Panitera Muda Perdata | 05-11-2018 | 1927/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 | S1 |
| 13. | YONESRIAN WASE PALETTE, S.H. 19800414 200604 1 003 | Penata Muda Tingkat I III/b | 01-04-2019 | 1190/DJU/SK/KP.04.1/4/2019 | Panitera Muda Pidana | 05-11-2018 | 1927/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 | S1 |
| 14. | LUKMAN IHA 19690314 199303 1 002 | Penata Muda III/a | 01-04-2020 | 509/DJU/SK/KP.04.1/3/2020 | Juru Sita | 28-09-2018 | 1927/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 | SLTA/SEDERAJAT |
| 15. | YERNIKI B RUNTUBOY RANGGUF, S.H. 19930913 201903 1 003 | Penata Muda III/a | 01-03-2019 | 887/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum | 02-03-2020 | 08/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 | S1 |
| 16. | WAHYU CHANDRA RAMADHAN, S.H. 19880502 201903 1 002 | Penata Muda III/a | 01-03-2019 | 888/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | Analisis SDM Aparatur, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 02-03-2020 | 08/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 | S2 |
| 17. | ANDRE RICART MATULESSY, S.H. 19970509 202012 1 003 | Penata Muda III/a | 01-12-2020 | 1604/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2019 | Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana | 01-12-2020 | 1604/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | S1 |
| 18. | MUHAMMAD IKRAM, S.E. 19950319 202012 1 009 | Penata Muda III/a | 01-12-2020 | 2034/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | Verifikator Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan | 01-12-2020 | 2034/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | S1 |
| 19. | ARIF SEPTIAN, A.Md 19980601 201903 1 004 | Pengatur II/c | 01-03-2019 | 889/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | Bendahara Tingkat Pertama, Sub Bagian Umum dan Keuangan | 01-12-2020 | W30-U/08/KPT/2/2021 | DIII |
| 20. | RAMDANI SIDIQ, A.Md 19970207 202101 1 001 | Pengatur II/c | 01-01-2021 | 2066/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Perdata | 01-01-2021 | 2066/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | DIII |

**) Data diambil dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIKKEP) Mahkamah Agung RI - Pengadilan Negeri Kaimana*

KAIMANA, 01 NOVEMBER 2021
KETUA

TTD

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.
NIP. 19810725 200312 2 001



1. MUTASI

Mutasi Pegawai yang ada pada Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Mutasi | Nama | Gol. Ruang | Jabatan | Asal Satker | Satker Tujuan |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | Mutasi Masuk | M. TAUFIQ AKBAR M., S.H. | III/a | Hakim | PN. Manokwari | PN Kaimana |
| 2. | Mutasi Masuk | DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H. | IV/a | Wakil Ketua | PN Sorong | PN Kaimana |
| 3. | Mutasi Masuk | ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H. | III/d | Hakim | PT Kupang | PN. Kaimana |
| 4. | Mutasi Keluar | NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS A., S.H. | III/a | Hakim | PN. Kaimana | PN. Bajawa |

2. PROMOSI

Pada tahun 2021, terdapat 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil/Hakim yang mendapat promosi jabatan, yaitu:

Nama : **DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.**
NIP : 19810725 200312 2 001
Pangkat/gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan Lama : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
Jabatan Baru : Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
TMT : 18 Oktober 2021
No. SK : 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021

3. PENSIUN

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada pegawai pada P yang memasuki masa pensiun. Namun pada tanggal 30 Juni 2021, Ketua Pengadilan Negeri Kaimana meninggal dunia. Berikut biodata Almarhum;

Nama : **BENYAMIN NUBOBA, S.H.**
NIP : 19701203 199903 1 008
Pangkat/gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
Masa Kerja : 22 Tahun 3 Bulan
Keterangan : Meninggal Dunia pada tanggal 30 Juni 2021

4. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

| No. | Nama | Jabatan | Nama Diklat Yang Diikuti |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H. | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Lingkungan Peradilan Umum Gelombang 1 Seluruh Indonesia 2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 |
| 2 | BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H. | Panitera | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan <i>Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang V Angkatan 23</i> |
| 3 | WELDA FIFIN, S.H. | Panitera Muda Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Pelatihan <i>Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang V Angkatan 24</i> |
| 4 | NOVITA SAMPE, ST | Kasubbag PTIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan <i>Online Basic User Experience Design 05 dan 6</i> 2. Pelatihan <i>Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang 2</i> dari Tempat Tugas Tahun 2021 3. Peserta Pelatihan <i>E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Angkatan V</i> |
| 5 | JAKLELY LODEWIK SERPARA, ST | Kasubbag Umum dan Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan <i>Online E-Learning Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSMPM) Angkatan II</i> |
| 6 | WAHYU CHANDRA RAMADHAN, S.H. | Analisis SDM ASN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan <i>Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator Kelas 01 s/d 04</i> 2. Pelatihan <i>Online Manajemen Aset Gelombang I</i> 3. Pelatihan Seminar Online Gelombang 3 Kerjasama dengan PPM <i>Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi</i> 4. Pelatihan <i>E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Angkatan 3</i> 5. Pelatihan <i>E-Learning Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang 3 Angkatan XIII s.d XVI</i> |

| | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|--|
| 7 | Arif Septian, A.Md | Pengelola Sistem dan Jaringan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Online <i>Basic Modelling 3D Max Kelas 01 sd 02</i> 2. Pelatihan Online <i>Basic User Interface Design Kelas 09 sd 10</i> dari Tempat Tugas Tahun 2021 3. Peserta Pelatihan Online <i>Manajemen Aset Gelombang IV</i> |
| 8 | Andre R. Matulesy, S.H. | CPNS | 1. Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> Melalui <i>E-Learning</i> Gelombang I Golongan III Angkatan 1 s.d XII Tahun 2021 |
| 9 | Muhammad Ikram, S.E. | CPNS | 1. Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> Melalui <i>E-Learning</i> Gelombang I Golongan III Angkatan 1 s.d XII Tahun 2021 |
| 10 | Ramdani Sidiq, A.Md | CPNS | Peserta Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> Melalui <i>E-Learning</i> Gelombang II Golongan II Angkatan 1 s.d XII Tahun 2021 |



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Kaimana mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA 401933 dan DIPA 402039.

- Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 sebesar Rp. 3.996.295.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Semnilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Berikut Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021:

1. Program Dukungan Manajemen Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (401933)

Terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai (51) sebesar Rp 2.644.349.000 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- b. Belanja Barang Operasional (52) sebesar Rp 1.318.346.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
- c. Belanja Barang Non Operasional (52) sebesar Rp. 8.600.000 (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Satuan Kerja Pengadilan Negeri kaimana (401933)

- Belanja Moda (53) sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

| Kode | Uraian [register - Beban - Jnsban - Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota] | Pagu | Realisasi | Sisa Dana |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------|
| WA | Program Dukungan Manajemen | 3.996.295.000 | 3.868.872.314 | 127.422.686 |
| 1066 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 3.971.295.000 | 3.843.872.314 | 127.422.686 |
| 1066.EAA | Layanan Perkantoran | 3.962.695.000 | 3.835.272.314 | 127.422.686 |
| 1066.EAA.001 | Layanan Perkantoran | 3.962.695.000 | 3.835.272.314 | 127.422.686 |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | 2.644.349.000 | 2.621.291.309 | 23.057.691 |
| A | Pembayaran gaji dan tunjangan | 2.644.349.000 | 2.621.291.309 | 23.057.691 |
| 511111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Gaji Pokok PNS | 865.600.000 | 858.706.940 | 6.893.060 |
| 511119 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pembulatan Gaji PNS | 18.000 | 16.703 | 1.297 |
| 511121 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 42.000.000 | 40.363.840 | 1.636.160 |
| 511122 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Anak PNS | 11.160.000 | 11.106.210 | 53.790 |
| 511123 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Struktural PNS | 21.280.000 | 21.280.000 | 0 |
| 511124 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1.002.338.000 | 1.000.580.000 | 1.758.000 |
| 511125 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. PPh PNS | 143.900.000 | 142.988.156 | 1.301.844 |
| 511126 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Beras PNS | 40.853.000 | 40.772.460 | 80.540 |
| 511129 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Uang Makan PNS | 170.000.000 | 160.082.000 | 9.908.000 |
| 511138 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS | 149.000.000 | 148.585.000 | 415.000 |
| 511151 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Umum PNS | 16.000.000 | 15.590.000 | 410.000 |
| 511157 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Kermahalan Hakim | 182.200.000 | 181.600.000 | 600.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.318.346.000 | 1.213.981.005 | 104.364.995 |
| A | KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN | 338.876.000 | 316.666.905 | 22.209.095 |
| 521111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Keperluan Perkantoran | 265.760.000 | 243.647.000 | 22.113.000 |
| 521119 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya | 31.136.000 | 31.122.655 | 13.345 |
| 521811 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 41.980.000 | 41.897.250 | 82.750 |
| B | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 389.840.000 | 350.924.850 | 38.915.150 |
| 521111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Keperluan Perkantoran | 194.000.000 | 185.103.431 | 8.896.569 |
| 521114 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 15.000.000 | 11.771.675 | 3.228.325 |
| 522111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Langganan Listrik | 60.000.000 | 40.577.500 | 19.422.500 |
| 522112 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Langganan Telepon | 3.600.000 | 1.692.244 | 1.907.756 |
| 522113 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Langganan Air | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 522141 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Sewa | 116.640.000 | 111.780.000 | 4.860.000 |
| C | PEMELIHARAAN KANTOR | 199.100.000 | 175.597.432 | 23.502.568 |
| 523111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 120.000.000 | 102.385.512 | 17.614.488 |
| 523121 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 79.100.000 | 73.211.920 | 5.888.080 |
| D | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR | 77.750.000 | 65.010.000 | 12.740.000 |
| 521115 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 44.400.000 | 36.200.000 | 8.200.000 |
| 521119 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya | 33.350.000 | 28.810.000 | 4.540.000 |
| E | PELANTIKAN DAN SUMPAAH JABATAN | 4.800.000 | 4.300.000 | 500.000 |
| 521119 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 |
| 522191 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Jasa Lainnya | 800.000 | 800.000 | 0 |
| F | RAPAT KOORDINASI INTERNAL | 19.200.000 | 17.663.000 | 1.537.000 |
| 521119 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya | 19.200.000 | 17.663.000 | 1.537.000 |
| G | KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING | 244.280.000 | 243.709.954 | 570.046 |
| 524111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 244.280.000 | 243.709.954 | 570.046 |
| H | KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL | 30.000.000 | 25.616.064 | 4.383.936 |
| 524111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30.000.000 | 25.616.064 | 4.383.936 |
| I | PENANGANAN PANDEMI COVID-19 | 14.500.000 | 14.492.800 | 7.200 |
| 521131 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional - Penanganan | 14.500.000 | 14.492.800 | 7.200 |
| 1066.EAC | Layanan Umum | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 |
| 1066.EAC.003 | Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 |
| 052 | Non Operasional Satker Daerah | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 |
| A | PENANGANAN COVID-19 NON OPERASIONAL | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 521241 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| C | Dukungan Stranas P4GN | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 521219 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 1071 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 1071.EAD | Layanan Sarana Internal | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 1071.EAD.001 | Layanan Sarana Internal | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| A | PC KEPANITERAAN | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 532111 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021:

1. Belanja Pegawai : Rp. 2.621.291.309 (99,13%)
2. Belanja Barang/Operasional : Rp. 1.213.981.005 (92,08%)
3. Belanja Barang/Non Operasional : Rp. 8.600.000 (100%)
4. Belanja Modal : Rp. 25.000.000 (100%)

- Anggaran DIPA 03 Tahun 2021 adalah Rp. 38.554.000. (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Berikut Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (402039)

Terdiri dari :

- a. Perkara Pidana yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Papua sebesar Rp. 14.554.000 (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)
- b. Layanan Hukum Posbakum sebesar Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

| Kode | Uraian [register - Beban - Jnsbn - Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota] | Pagu | Realisasi | Sisa Dana |
|--------------|---|------------|------------|-----------|
| BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 38.554.000 | 33.933.000 | 4.621.000 |
| 1049 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 38.554.000 | 33.933.000 | 4.621.000 |
| 1049.BCA | Perkara Hukum Perseorangan | 14.554.000 | 9.933.000 | 4.621.000 |
| 1049.BCA.143 | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Papua | 14.554.000 | 9.933.000 | 4.621.000 |
| 051 | Pendaftaran Berkas Perkara | 3.850.000 | 3.148.000 | 702.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 3.850.000 | 3.148.000 | 702.000 |
| 521211 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 521811 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 3.150.000 | 3.148.000 | 2.000 |
| 052 | Penetapan hari sidang | 1.500.000 | 1.350.000 | 150.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 1.500.000 | 1.350.000 | 150.000 |
| 524113 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | 1.350.000 | 150.000 |
| 053 | Pemeriksaan di sidang Pengadilan | 3.500.000 | 2.125.000 | 1.375.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 3.500.000 | 2.125.000 | 1.375.000 |
| 521211 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan | 3.500.000 | 2.125.000 | 1.375.000 |
| 054 | Minutasi dan upaya hukum | 1.400.000 | 580.000 | 840.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 1.400.000 | 580.000 | 840.000 |
| 521211 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan | 1.400.000 | 580.000 | 840.000 |
| 055 | Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa | 1.777.000 | 1.400.000 | 377.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 1.777.000 | 1.400.000 | 377.000 |
| 521114 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 277.000 | 0 | 277.000 |
| 524113 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | 1.400.000 | 100.000 |
| 056 | Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan penahanan | 1.777.000 | 1.100.000 | 677.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 1.777.000 | 1.100.000 | 677.000 |
| 521114 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 277.000 | 0 | 277.000 |
| 524113 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | 1.100.000 | 400.000 |
| 057 | Penangan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama | 450.000 | 50.000 | 400.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 450.000 | 50.000 | 400.000 |
| 521114 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 524113 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000 | 50.000 | 250.000 |
| 058 | Penangan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 521114 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 524113 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1049.QBA | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 1049.QBA.032 | Pos Bantuan Hukum | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 051 | Pos Bantuan Hukum | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| A | TANPA SUB KOMPONEN | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 522131 | [00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Jasa Konsultansi | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021:

1. Perkara peradilan umum yang Diselesaikan di tingkat pertama : Rp. 9.933.000 (68,25%)
2. Pos Bantuan Hukum : Rp. 24.000.000 (100%)

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kaimana yang digunakan saat ini merupakan eks aset *Zitting Plaats* dari Pengadilan Negeri Fakfak.



Gambar Kondisi Bangunan Pengadilan Negeri Kaimana saat ini

b. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Kaimana belum memiliki rumah dinas, tetapi pada anggaran Pengadilan Negeri Kaimana terdapat alokasi anggaran untuk sewa rumah dinas khusus untuk Hakim (Ketua, Wakil Ketua dan Hakim)

c. Pengadaan

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Kaimana mendapatkan alokasi untuk program pengadaan sarana dan prasarana berupa pengadaan pengolah data Pendukung Kepaniteraan, yaitu 2 (dua) buah Paket Personal Computer (PC) All in one yang ddialokasikan sebesar Rp. 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dan realisasinya mencapai 100%.

2. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dalam tahun 2021 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana gedung baik itu yang bersumber dari belanja modal maupun dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:

- a.** Perawatan gedung kantor Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 102.385.512 (Seratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) atau presentase penyerapan 85,32%
- b.** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp. 79.100.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 73.211.920,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) atas presentase penyerapan 92,55%

3. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Berikut Tabel Daftar Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Kaimana:

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 December 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PROPINSI PAPUA BARAT
NAMA UAKPB : PN KAIMANA
KODE UAKPB : 005.01.33.401933.000

Tanggal : 13-01-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LKBT- PKPB1

| No. | Sub-Sub Kelompok | | N U P | Satuan | Harga Perolehan | Kondisi | | |
|---|------------------|---|-------|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|
| | Kode Barang | Nama Barang | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2.01.01.04.001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2 | M2 | 183,540,296 | 9,497 | 0 | 0 |
| 2 | | | 3 | | 46,459,704 | 2,404 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</i> | | | | | 230,000,000 | 11,901 | 0 | 0 |
| 1 | 3.02.01.01.999 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya | 1 | | 290,000,000 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 397,000,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya</i> | | | | | 687,000,000 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 3.02.01.04.999 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | 1 | | 22,000,000 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 22,000,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya</i> | | | | | 44,000,000 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 3.05.01.04.002 | Lemari Kayu | 1 | Buah | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | | | 6 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | | | 7 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | | | 8 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | | | 9 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | | | 10 | | 6,451,636 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Lemari Kayu</i> | | | | | 64,516,360 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 3.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu | 1 | Buah | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | | | 6 | | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | | | 7 | | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | | | 8 | | 2,410,909 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | | | 9 | | 7,916,364 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | | | 10 | | 7,916,364 | 1 | 0 | 0 |

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 December 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PROPINSI PAPUA BARAT
NAMA UAKPB : PN KAIMANA
KODE UAKPB : 005.01.33.401933.000

Tanggal : 13-01-2022
Halaman : 2
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

| No. | Sub-Sub Kelompok | | N U P | Satuan | Harga Perolehan | Kondisi | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|-------|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|
| | Kode Barang | Nama Barang | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Jumlah Meja Kerja Kayu</i> | | | | | 35,120,000 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 05 . 02 . 01 . 003 | Kursi Besi/metal | 1 | Buah | 3,365,455 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 3,365,455 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | | | 6 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | | | 7 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | | | 8 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | | | 9 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | | | 10 | | 2,047,273 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | | | 11 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | | | 12 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | | | 13 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | | | 14 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | | | 15 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | | | 16 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | | | 17 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | | | 18 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | | | 19 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | | | 20 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | | | 21 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | | | 22 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | | | 23 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | | | 24 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | | | 25 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | | | 26 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | | | 27 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | | | 28 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | | | 29 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 December 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PROPINSI PAPUA BARAT
NAMA UAKPB : PN KAIMANA
KODE UAKPB : 005.01.33.401933.000

Tanggal : 13-01-2022
Halaman : 3
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

| No. | Sub-Sub Kelompok | | N U P | Satuan | Harga Perolehan | Kondisi | | |
|---|------------------------|---|-------|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|
| | Kode Barang | Nama Barang | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 3 . 05 . 02 . 01 . 003 | Kursi Besi/metal | 30 | Buah | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | | | 31 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | | | 32 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | | | 33 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | | | 34 | | 810,909 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Kursi Besi/metal</i> | | | | | 42,570,910 | 34 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 05 . 02 . 04 . 004 | A.c. Split | 1 | Buah | 4,545,455 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 4,545,455 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 4,545,455 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 4,545,455 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 4,545,455 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | | | 6 | | 4,545,455 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah A.c. Split</i> | | | | | 27,272,730 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 06 . 01 . 01 . 048 | Uninterruptible Power Supply (ups) | 1 | Buah | 2,534,000 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 2,534,000 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 2,534,000 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 2,534,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Uninterruptible Power Supply (ups)</i> | | | | | 10,136,000 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 06 . 01 . 02 . 135 | Lcd Monitor | 1 | Buah | 6,391,666 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 6,391,666 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 6,391,666 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 6,391,666 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 6,391,666 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | | | 6 | | 6,391,670 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Lcd Monitor</i> | | | | | 38,350,000 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 06 . 02 . 07 . 005 | Finger Printer Time And Attendance Acces Control System | 1 | Buah | 5,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Finger Printer Time And Attendance Acces Control System</i> | | | | | 5,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 08 . 01 . 41 . 194 | Personal Computer | 1 | Buah | 12,500,000 | 1 | 0 | 0 |

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 December 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PROPINSI PAPUA BARAT
NAMA UAKPB : PN KAIMANA
KODE UAKPB : 005.01.33.401933.000

Tanggal : 13-01-2022
Halaman : 4
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

| No. | Sub-Sub Kelompok | | N U P | Satuan | Harga Perolehan | Kondisi | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|
| | Kode Barang | Nama Barang | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 . 08 . 01 . 41 . 194 | Personal Computer | 2 | Buah | 12,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Personal Computer</i> | | | | | 25,000,000 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 01 . 01 . 999 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | | 17,840,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Komputer Jaringan Lainnya</i> | | | | | 17,840,000 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 01 . 02 . 001 | P.c Unit | 1 | Buah | 9,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 9,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 9,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 9,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 12,187,400 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | | | 6 | | 12,187,400 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | | | 7 | | 12,187,400 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | | | 8 | | 12,187,400 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | | | 9 | | 12,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | | | 10 | | 12,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | | | 11 | | 12,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | | | 12 | | 12,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah P.c Unit</i> | | | | | 137,372,800 | 12 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 01 . 02 . 002 | Lap Top | 1 | Buah | 12,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 12,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 13,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 13,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 13,500,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Lap Top</i> | | | | | 65,811,600 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 02 . 03 . 003 | Printer (peralatan Personal Komputer) | 1 | Buah | 1,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 1,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 1,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 1,655,800 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Printer (peralatan Personal Komputer)</i> | | | | | 6,623,200 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 02 . 04 . 001 | Server | 1 | Buah | 39,655,800 | 1 | 0 | 0 |

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 December 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PROPINSI PAPUA BARAT
NAMA UAKPB : PN KAIMANA
KODE UAKPB : 005.01.33.401933.000

Tanggal : 13-01-2022
Halaman : 5
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

| No. | Sub-Sub Kelompok | | N U P | Satuan | Harga Perolehan | Kondisi | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|
| | Kode Barang | Nama Barang | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 . 10 . 02 . 04 . 001 | Server | 2 | Buah | 84,310,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Server</i> | | | | | 123,965,800 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 02 . 04 . 002 | Router | 1 | Buah | 6,821,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Router</i> | | | | | 6,821,000 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 02 . 04 . 014 | Rak Server | 1 | Buah | 9,866,590 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 13,430,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Rak Server</i> | | | | | 23,296,590 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 02 . 04 . 021 | Kabel Utp | 1 | Buah | 2,316,666 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 2,316,666 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 2,316,668 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Kabel Utp</i> | | | | | 6,950,000 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 02 . 04 . 023 | Wireless Access Point | 1 | Buah | 1,575,666 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 1,575,666 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 1,575,666 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 1,575,666 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 1,575,666 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | | | 6 | | 1,575,670 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Wireless Access Point</i> | | | | | 9,454,000 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 3 . 10 . 02 . 04 . 024 | Switch | 1 | Buah | 1,999,000 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 1,999,000 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | 3 | | 1,999,000 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | | 4 | | 1,999,000 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 | | 1,999,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Switch</i> | | | | | 9,995,000 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 6 . 01 . 01 . 01 . 001 | Monografi | 1 | Buah | 105,000 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | 2 | | 85,000 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Jumlah Monografi</i> | | | | | 190,000 | 2 | 0 | 0 |

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-court

E-Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang dimaksud dengan aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang, pemberitahuan dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2021, Perkara lewat e-Court adalah nihil, dengan alasan teknis. Karena permasalahan Virtual Account (VA) dari pihak Bank.

2. Implementasi SIPP

Berikut implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021:

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan

pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Untuk mengakses informasi yang ada di Pengadilan Negeri Kaimana, dapat mengunjungi situs website : www.pn-kaimana.go.id

Dan untuk mengakses informasi penelusuran perkara, dapat mengakses pada sipp.pn-kaimana.go.id

3. Hardware (Perangkat Keras) pada Ruang Server IT

Ruang Server memiliki beberapa fasilitas atau perangkat, antara lain :

- a. 2 (Dua) Buah Server, dengan keadaan bahwa 1 (satu) server sudah tidak dapat digunakan karena rusak.
- b. 1 (satu) buah Router
- c. 4 (empat) buah Modem
- d. 1 (satu) buah Personal Computer dan 1 (satu) buah laptop

4. Software (Perangkat Lunak)

Software yang digunakan pada Pengadilan Negeri Kaimana adalah Microsoft Office 2010 dan 2019, sedangkan system operasi yang digunakan adalah Windows 7 dan Windows 10. Dan untuk antivirus yang digunakan adalah Kapersky.

5. Jaringan Internet (Internet Connection)

Untuk Jaringan internet yang ada pada Pengadilan Negeri Kaimana adalah Astinet dengan bandwidth 10 Mbps dan indihome yang jaringannya dikoneksikan ke masing-masing ruangan dengan menggunakan jaringan wireless Fidelity (Wi-Fi) maupun dengan LAN (Local Area Network).

6. Website

Pengadilan Negeri Kaimana berupaya memberikan pelayanan terutama dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka memenuhi asas Transparansi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi DI Pengadilan. Adapun website resmi Pengadilan Negeri Kaimana yang digunakan yaitu : www.pn.kaimana.go.id

7. Publikasi Perkara (One Day Publish)

Untuk mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung RI yaitu Badan Peradilan Yang Agung di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, maka Mahkamah Agung menghadirkan aplikasi Penelusuran Perkara yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang berisi informasi tentang perkembangan jalannya suatu sidang. Untuk mengakses SIPP Pengadilan Negeri Kaimana, dapat mengakses : sipp.pn-kaimana.go.id dan untuk mengakses putusan Pengadilan Negeri Kaimana pada : putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-kaimana



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Kaimana telah mengikuti Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diaudit. Dan berdasarkan Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II diberikan Akreditasi dengan kualifikasi “A” (Excellent).



Sertifikat APM Pengadilan Negeri Kaimana

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dasar Hukum dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Negeri Kaimana dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Sorong, pemerintah, aparat penegak hukum lain termasuk Advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya. Adapun jenis-jenis pelayanan yang diterapkan pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kaimana, antara lain :

a. Kepaniteraan Pidana

1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
2. Pendaftaran permohonan praperadilan;
3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
8. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
9. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
10. Penerimaan permohonan pembantaran;
11. Penerimaan permohonan izin besuk;
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

b. Kepaniteraan Perdata

1. Pendaftaran perkara gugatan biasa;
2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
3. Pendaftaran vaset atas putusan verstek;
4. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
5. Pendaftaran perkara permohonan;
6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
9. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
11. Pendaftaran permohonan eksekusi;
12. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
13. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
15. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase;
16. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

c. Kepaniteraan Hukum

1. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
2. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
3. Permohonan pendaftaran penolakan waris;
4. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
5. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
6. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
8. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
9. Permohonan legalisasi surat;
10. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
11. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dari Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kaimana.

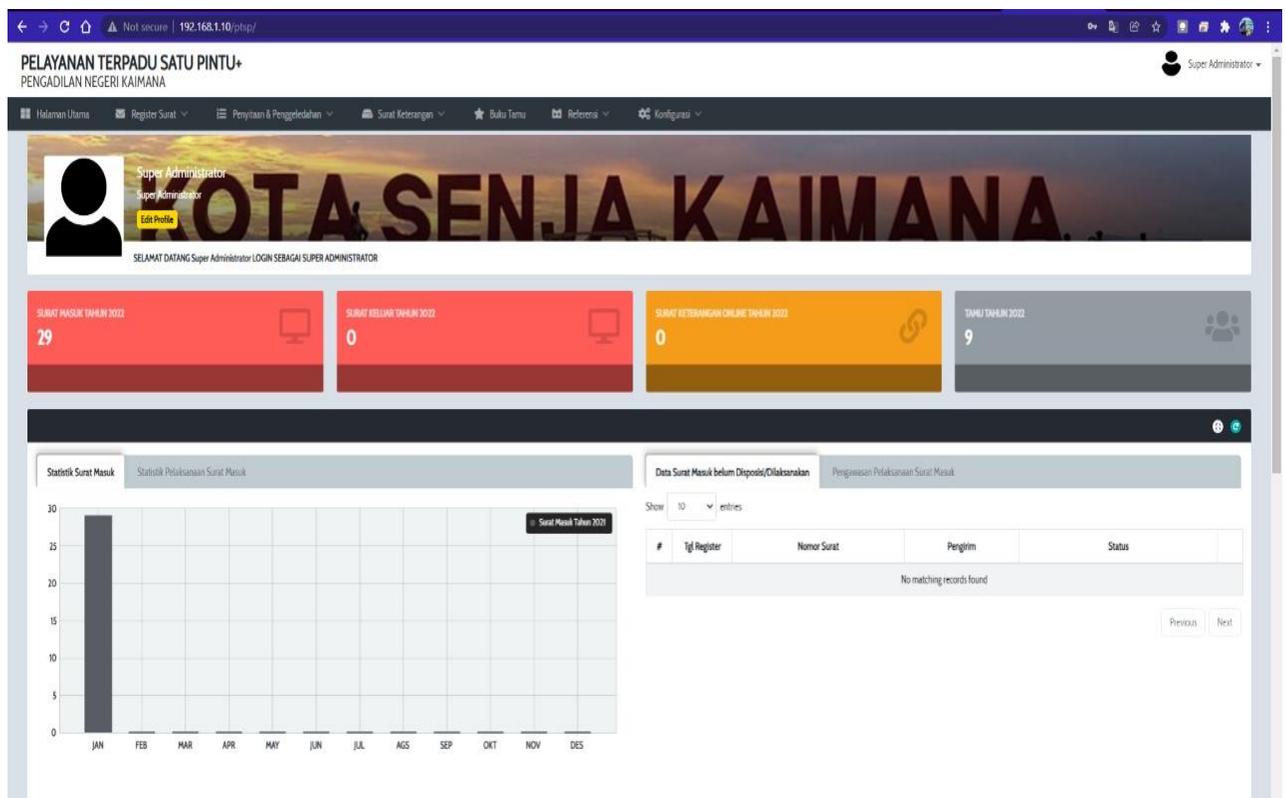
e. Pojok E-Court

Melayani Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court



Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dan Para Petugas PTSP

f. Aplikasi PTSP+



Interface Aplikasi PTSP+

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan Publik yang ada pada Pengadilan Negeri Kaimana, yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat yang disajikan melalui website Pengadilan Negeri Kaimana, yang diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana, yang nantinya akan menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan di Pengadilan Negeri Kaimana.



Tampilan Menu Survei Kepuasan Masyarakat pada Website Pengadilan Negeri Kaimana



KUESIONER KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KAIMANA KELAS II

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II

Dengan ini memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr. terpilih sebagai responden penelitian untuk ikut berpartisipasi dalam Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II untuk Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II.

Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan publik dari Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II, melalui metode wawancara langsung ataupun secara online kepada responden untuk mendapatkan atau mengetahui apa yang dirasakan dan dialami dalam pelayanan Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih atas partisipasinya didalam reformasi birokrasi.

Tim Survei

 pnkaimana@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)

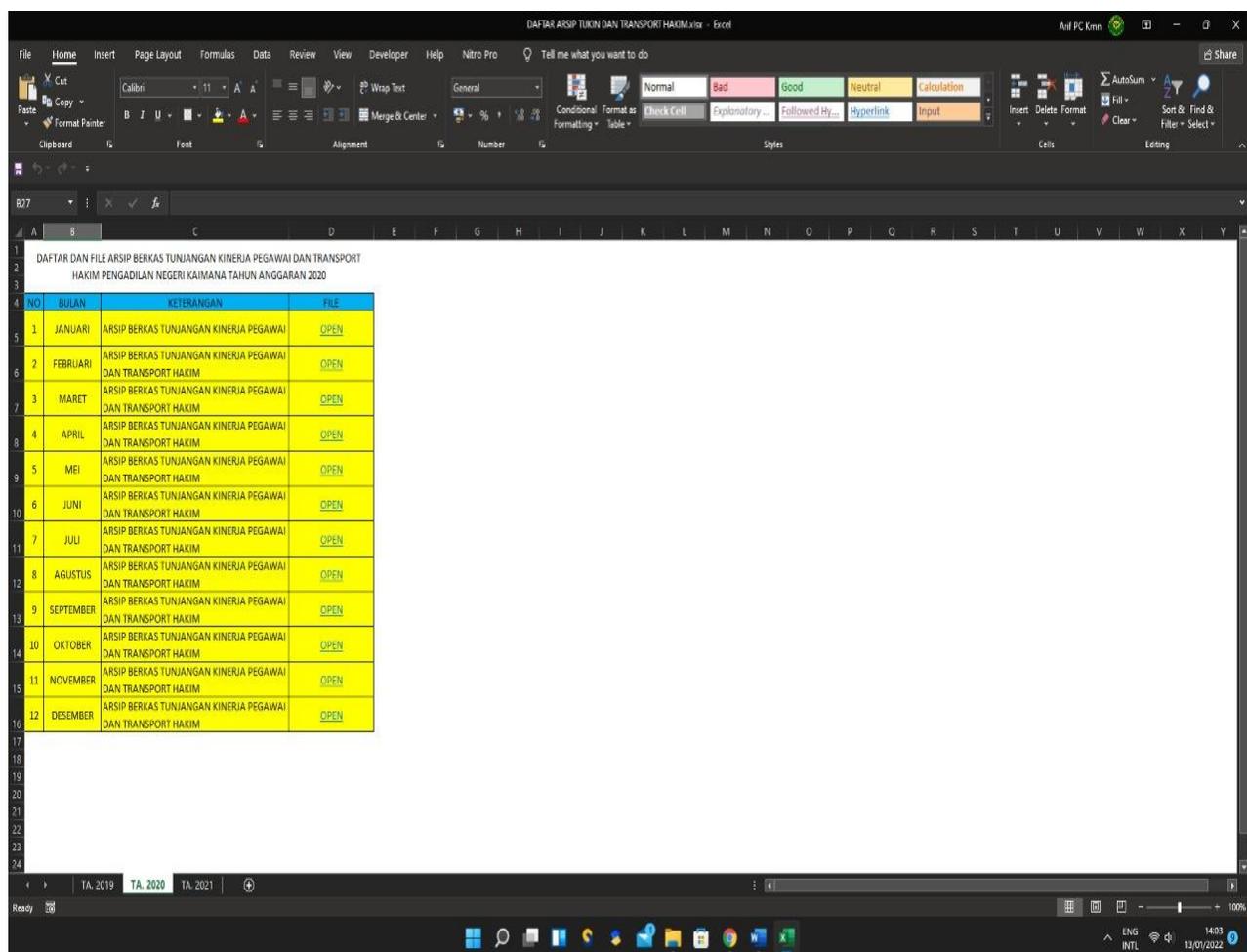


* Wajib

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat pada Website
Pengadilan Negeri Kaimana

2. Sistem Informasi Administrasi Arsip Keuangan Melalui Digitalisasi Arsip

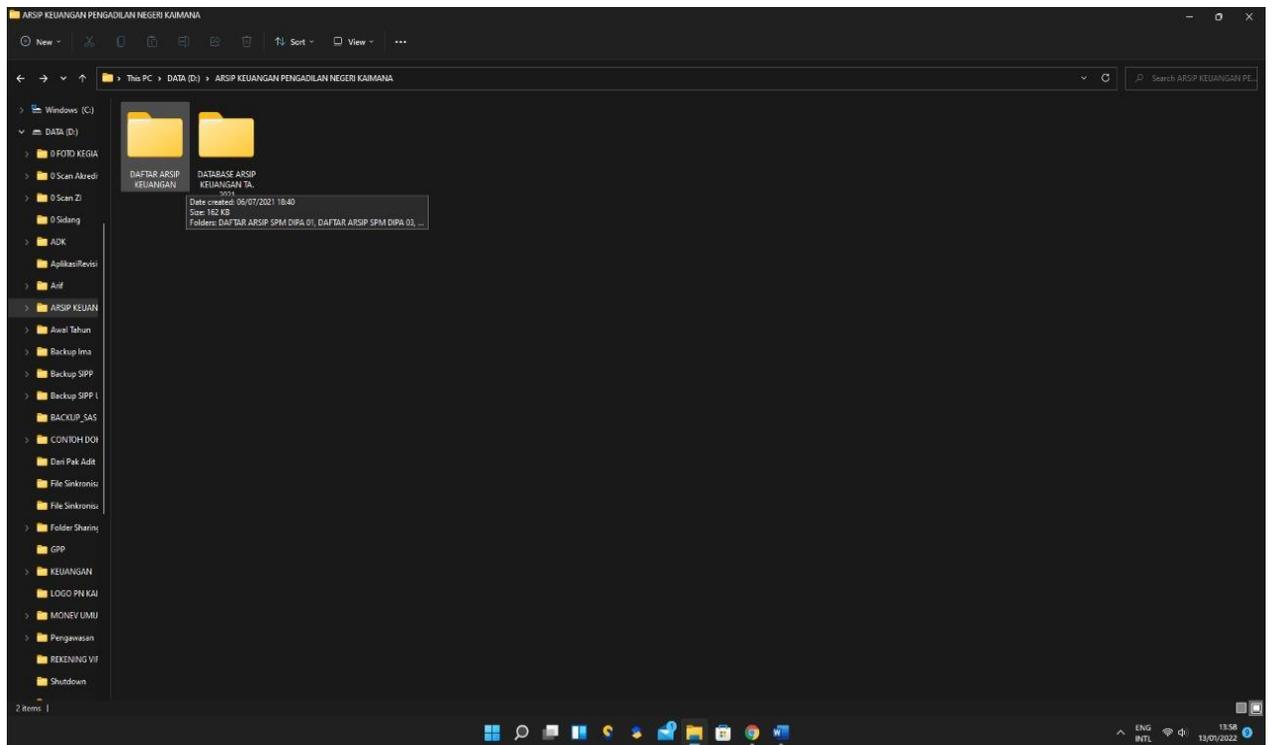
Sistem Informasi Administrasi Arsip Keuangan Melalui Digitalisasi Arsip ini digunakan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang digunakan untuk menyatukan data-data Keuangan yang telah dipindai (scanning) seperti Kuitansi, SPM, SPPD, dan surat2 lainnya secara digital. Basic dari Sistem Informasi ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Diharapkan system informasi ini dapat dikembangkan sehingga dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar dan lebih memudahkan dalam proses pemindaian data dan penyimpanan dalam data base.



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "DAFTAR ARSIP TUKIN DAN TRANSPORT HAKIM.xlsx". The spreadsheet contains a table with the following data:

| NO | BULAN | KETERANGAN | FILE |
|----|-----------|--|----------------------|
| 1 | JANUARI | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 2 | FEBRUARI | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 3 | MARET | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 4 | APRIL | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 5 | MEI | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 6 | JUNI | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 7 | JULI | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 8 | AGUSTUS | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 9 | SEPTEMBER | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 10 | OKTOBER | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 11 | NOVEMBER | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |
| 12 | DESEMBER | ARSIP BERKAS TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAN TRANSPORT HAKIM | OPEN |

Tampilan Awal Sistem Informasi Administrasi Keuangan



Tampilan Folder Hasil Penyimpanan Arsip Keuangan yang telah Dipindai



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Pengawas Melekat (Waskat)

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Kaimana telah melaksanakan secara terus-menerus.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

➤ Maksud dan tujuan pengawasan :

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan
- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidakefisiensi penyelenggaraan peradilan;
- d. Menilai kinerja aparat di Pengadilan
- e. Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi)

Untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menunjuk hakim-hakim sesuai surat keputusan Nomor W30-U11/169/SK.KPN/02/2021 untuk mengawasi bagian-bagian sebagai berikut:

- 1) DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.,
 - a) Koordinator Pengawas Bidang
 - b) Pengawas Bidang Umum dan Keuangan;
- 2) YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim Pengawas Bidang Perdata;
- 3) INDRA ARDIANSYAH, S.H. sebagai Hakim Pengawas bidang Hukum dan KIMWASMAT;
- 4) NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H., sebagai Hakim Pengawas Bidang Pidana
- 5) ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., sebagai Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- 6) MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H., sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

B. EVALUASI

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat Dinas secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan. Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil evaluasi. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas masing-masing hakim pengawas.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Kaimana yang telah disusun ini, kami membuat beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan kinerja dalam pengelolaan administrasi di Pengadilan Negeri Kaimana, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum di Pengadilan Negeri Kaimana sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru dari Mahkamah Agung RI.
2. Sumber daya manusia baik di bidang teknis maupun non-teknis, perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya secara berkesinambungan.
3. Pengelolaan anggaran DIPA dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kaimana sudah berjalan dengan baik, terlihat dari persentase penyerapan anggaran yang rata-rata di atas 90%;
4. Pengelolaan aset di Pengadilan Negeri Kaimana masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam ketertiban pendaftaran aset.

B. REKOMENDASI

1. Agar sosialisasi kebijakan-kebijakan baru Mahkamah Agung RI, dapat dilakukan terus-menerus, untuk meningkatkan pemahaman sehingga mudah untuk diimplementasikan di satuan kerja
2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Kaimana, karena ada beberapa bidang yang belum memiliki staf atau tenaga yang dapat membantu tugas pokok dan fungsi dalam rangka untuk pelayanan yang prima.
3. Alokasi anggaran untuk biaya sewa rumah dinas Hakim di Pengadilan Negeri Kaimana agar perlu ditingkatkan, mengingat kondisi riil standar untuk harga sewa rumah di Kabupaten Kaimana melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) untuk biaya sewa rumah dinas yang telah ditetapkan pemerintah untuk Provinsi Papua Barat



PENGADILAN NEGERI KAIMANA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA NOMOR: W30-U11/36/SK.KPN/01/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PENGADILAN NEGERI KAIMANA TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA TENTANG PENUNJUK TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PENGADILAN NEGERI KAIMANA TAHUN 2021'**
- Pertama** : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusun agar dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 paling lama pada minggu Kedua Bulan Januari 2021;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kaimana
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KETUA

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.
NIP. 198107252003122001

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA
Nomor : W30-U11/36/ SK.KPN/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI KAIMANA TAHUN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------|
| 1. | DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H. | Ketua | Penasihat/Pelindung |
| 2. | ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H. | Hakim | Ketua |
| 3. | YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. | Hakim | Anggota |
| 4. | INDRA ARDIANSYAH, S.H. | Hakim | Anggota |
| 5. | BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H. | Panitera | Sekretaris 1 |
| 6. | HUBERTHINA TAFRE, S.H. | Sekretaris | Sekretaris 2 |
| 7. | JAKLELY LODEWIK SERPARA, S.T | Kasubbag Umum & Keuangan | Anggota |
| 8. | WELDA FIFIN, S.H. | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 9. | LIM KATANDEK, S.H. | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 10. | YONESRIAN WASE' PALETTE, S.H. | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 11. | WAHYU CHANDRA RAMADHAN, S.H. | Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana /Analis SDM Aparatur | Anggota |
| 12. | NOVITA SAMPE, S.T. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Operator |

Ditetapkan di : Kaimana
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KETUA

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.
NIP. 198107252003122001